DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu, 28 Mei 2025

RINGKASAN BERITA HARI INI

Tingkat Pengangguran Terbuka di Sidoarjo Turun 5.4 Persen

Sidoarjo,Bhirawa

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami penurunan sebesar 1,56%. Dari 8, 05% ditahun 2023, menurun menjadi 6,49% ditahun 2024. Pada tahun 2025, angka TPT menjadi 5,4%.

Berbagai cara ditempuh Pemkab Sidoarjo dalam upaya penurunan TPT di Kabupaten yang padat penduduk dan menjadi sasaran kaum urban untuk mencari pekerjaan di Provinsi Jawa Timur ini. Salah satunya menggelar Bursa Kerja Terbuka (BKT) setiap tahunnya.

"Angka penurunan TPT Kabupaten Sidoarjo ini paling tinggi di Jawa Timur. Namun TPT di Kabupaten Sidoarjo itu masih tergolong tinggi di Jawa Timur," kata Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, Selasa (27/5) kemarin, dalam acara gelar job fair hibrid 2025, yang digelar Disnaker Sidoarjo di Stadion Serba Guna GOR Sidoarjo.

Upaya Bursa Kerja Terbuka - (BKT) dengan sistim Job Fair Hybrid yang digelar setiap tahun oleh Disnaker Sidoarjo merupakan salah satu upaya untuk penurunan pengangguran di daerah ini. BKT pada tahun 2025 ini, akan berlangsung hingga, Rabu, 28 Mei 2025. Sebanyak 1.800 Lowongan Kerja (Loker) dibuka dalam BKT ini.

Mimik sempat memberikan pesan, para pencari kerja di Sidoarjo tidak mesti bekerja di perusahaan saja, tetapi juga bisa menjadi wirausaha. Disnaker Sidoarjo diminta untuk sering-sering memberikan pelatihan kepada pencari kerja agar juga bisa menjadi wirausaha. "Keberadaan UMKM di Sidoarjo juga sangat perlu untuk fasilitasi. Pasalnya keberadaan mereka juga akan mampu menyerap tenaga kerja," katanya.

Kepala Disnaker Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia SSos, dalam kesempatan itu menyampaikan, acara Job Fair Hybrid digelar secara online dan offline. Mulai tanggal 23-27 Mei, pelamar mengajukan lamaran pekerjaannya secara online. Kemudian dilakukan verifikasi lamaran pekerjaan oleh perusahaan secara offline atau secara langsung saat Job Fair digelar, 27-28 Mei.

"Dari data yang kami direkap, jumlah pencari kerja sebanyak 5 ribu orang dengan latar belakang pendidikan mulai sekolah menengah sampai sarjana. Jabatan yang dilamar mulai tingkat staff sampai manajer. Akan terus kami evaluasi pelaksanaan dari Job Fair Hybrid ini setiap tahunnya, tujuannya untuk memaksimalkan keterserapan tenaga kerja di Sidoarjo," ucap Ainun.

Ainun menjelaskan, saat ini jika dihitung dari 102 ribu orang warga Sidoarjo yang menganggur, kini tinggal 79 ribu orang. Dirinya berharap lewat bursa kerja terbuka setiap tahun, akan terus mampu menurunkan angka TPT di Kabupaten Sidoarjo. **[kus.fen]**

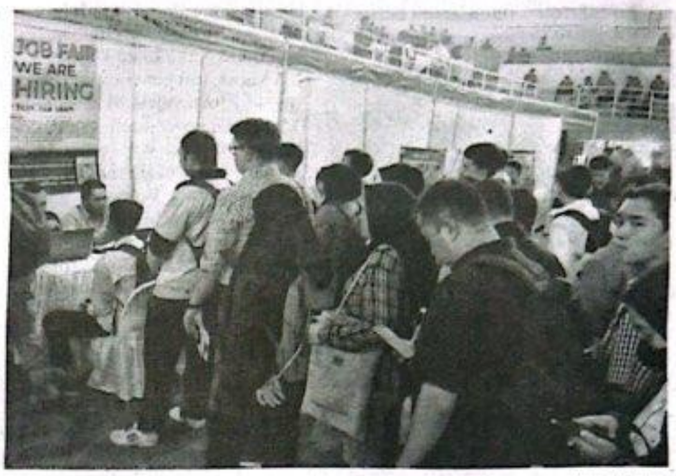

alkusyanto/bhirawa

Pelamar kerja antri di depan salah satu stan perusahaan di Bursa Kerja Terbuka tahun 2025.

Pemeriksaan Hewan Kurban di Sidoarjo

PETUGAS kesehatan dari Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo memeriksa salah satu mulut hewan kurban di Kawasan Lingkar Timur, Buduran, Sidoarjo, Selasa (27/5/2025). Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi fisik, mata, mulut, dan kuku hewan tersebut untuk memastikan hewan yang dijual layak kurban. **(ant/rus)**

Terjunkan Tim *Rukyatul Hilal* di 100 Titik

Menag Umumkan Idul Adha Tanggal 6 Juni 2025

Jakarta-HARIAN BANGSA

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat untuk menentukan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah/2025 Masehi. Hal ini akan turut menentukan kapan Hari Raya Idul Adha 1446 H, beserta hari penting lainnya seperti puasa Arafah.

Sidang Isbat yang digelar Selasa (27/5/2024) resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada 6 Juni 2025.

Pengumuman mengenai keputusan hasil sidang isbat Idul Adha 1446 H disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar.

"Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Sehingga 10 Dzulhijjah atau Idul Adha bertepatan pada 6 Juni 2025," kata Nasaruddin dalam konferensi pers hasil Sidang Isbat di Kementerian Agama.

"Alhamdulillah ya, karena di atas 3 derajat ya, berarti sudah (memenuhi syarat) ya," ujar Nasaruddin.

✧ Bersambung ke Hal. 11

Tim rukyatul hilal memantau tinggi bulan sebelum sidang isbat menentukan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah/2025 Masehi dan Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1446 H, Selasa (27/5/2025).

1.800 Lowongan Kerja...

ia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo bekerja lebih maksimal dalam menekan angka pengangguran.

"Saya ingin minimal 75 persen karyawan perusahaan di Sidoarjo adalah warga lokal," tegas Mimik.

Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, menjelaskan bahwa *Job Fair* ini bertujuan mempertemukan pencari kerja dan industri secara langsung, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien.

"Kami membantu perusahaan menemukan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Harapannya, tingkat pengangguran di Sidoarjo bisa terus ditekan," ujarnya.

Dengan sistem hybrid, para pencari kerja dapat mengakses informasi lowongan kerja secara lebih luas, serta mengirim lamaran ke banyak perusahaan dalam waktu bersamaan. "Tahun ini ada 40 perusahaan yang berpartisipasi, dengan total 1.800 lowongan kerja dari 192 posisi, mulai dari staf hingga manajer," terangnya.

"Hari ini jumlah pencari kerja mencapai 5.000 orang, mayoritas merupakan lulusan SMA hingga sarjana," pungkas Ainun. **(sai/vga)**

Scanned with CamScanner

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tingkat Pengangguran Terbuka di Sidoarjo Turun 5.4 Persen

Sidoarjo,Bhirawa

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami penurunan sebesar 1,56%. Dari 8, 05% ditahun 2023, menurun menjadi 6,49% ditahun 2024. Pada tahun 2025, angka TPT menjadi 5,4%.

Berbagai cara ditempuh Pemkab Sidoarjo dalam upaya penurunan TPT di Kabupaten yang padat penduduk dan menjadi sasaran kaum urban untuk mencari pekerjaan di Provinsi Jawa Timur ini. Salah satunya menggelar Bursa Kerja Terbuka (BKT) setiap tahunnya.

"Angka penurunan TPT Kabupaten Sidoarjo ini paling tinggi di Jawa Timur. Namun TPT di Kabupaten Sidoarjo itu masih tergolong tinggi di Jawa Timur," kata Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, Selasa (27/5) kemarin, dalam acara gelar job fair hibrid 2025, yang digelar Disnaker Sidoarjo di Stadion Serba Guna GOR Sidoarjo.

Upaya Bursa Kerja Terbuka (BKT) dengan sistim Job Fair Hybrid yang digelar setiap tahun oleh Disnaker Sidoarjo merupakan salah satu upaya untuk penurunan pengangguran di daerah ini. BKT pada tahun 2025 ini, akan berlangsung hingga, Rabu, 28 Mei 2025. Sebanyak 1.800 Lowongan Kerja (Loker) dibuka dalam BKT ini.

Mimik sempat memberikan pesan, para pencari kerja di Sidoarjo tidak mesti bekerja di perusahaan saja, tetapi juga bisa menjadi wirausaha. Disnaker Sidoarjo diminta untuk sering-sering memberikan pelatihan kepada pencari kerja agar juga bisa menjadi wirausaha. "Keberadaan UMKM di Sidoarjo juga sangat perlu untuk fasilitasi. Pasalnya keberadaan mereka juga akan mampu menyerap tenaga kerja," katanya.

Kepala Disnaker Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia SSos, dalam kesempatan itu menyampaikan, acara Job Fair Hybrid digelar secara online dan offline. Mulai tanggal 23-27 Mei, pelamar mengajukan lamaran pekerjaannya secara online. Kemudian dilakukan verifikasi lamaran pekerjaan oleh perusahaan secara offline atau secara langsung saat Job Fair digelar, 27-28 Mei.

"Dari data yang kami direkap, jumlah pencari kerja sebanyak 5 ribu orang dengan latar belakang pendidikan mulai sekolah menengah sampai sarjana. Jabatan yang dilamar mulai tingkat staff sampai manajer. Akan terus kami evaluasi pelaksanaan dari Job Fair Hybrid ini setiap tahunnya, tujuannya untuk memaksimalkan keterserapan tenaga kerja di Sidoarjo," ucap Ainun.

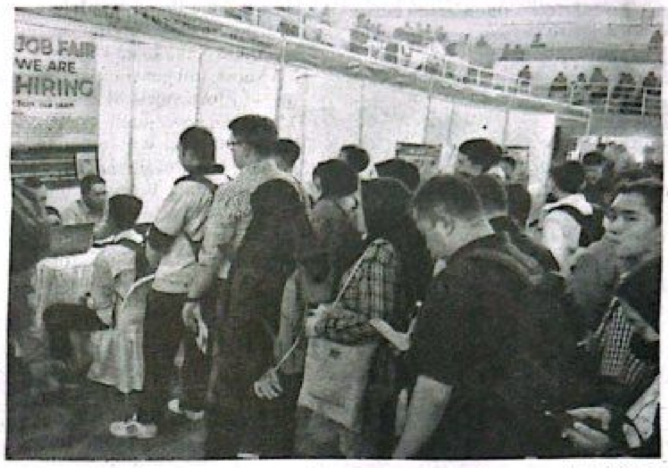

alikusyanto/bhirawa

Pelamar kerja antri di depan salah satu stan perusahaan di Bursa Kerja Terbuka tahun 2025.

Ainun menjelaskan, saat ini jika dihitung dari 102 ribu orang warga Sidoarjo yang menganggur, kini tinggal 79 ribu orang. Dirinya berharap lewat bursa kerja terbuka setiap tahun, akan terus mampu menurunkan angka TPT di Kabupaten Sidoarjo. **[kus.fen]**

Scanned with CamScanner

HARIAN **Bhirawa**

Sediakan 1.800 Lowongan Pekerjaan

Job Fair Hybrid 2025

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar Job Fair Hybrid 2025. Sebanyak ...0 perusahaan turut berpartisipasi, menyediakan 1.800 lowongan pekerjaan untuk 192 jabatan. Job Fair Hybrid ini berlangsung pada 27-28 Mei 2025 di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, Selasa (27/5/25).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana menyampaikan harapan agar Job Fair Hybrid 2025 dapat menjadi solusi nyata dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, meski mengalami penurunan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi persoalan krusial.

"BPS mencatat TPT Sidoarjo turun dari 8,05% di 2023 menjadi 6,49% di 2024, dan itu penurunan tertinggi di Jawa Timur. Tapi angka itu masih tergolong tinggi," ujarnya.

Ia juga menyoroti rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan di Sidoarjo.

"Kita ini kabupaten industri, dikelilingi perusahaan besar. Ironis jika warga lokal tidak terserap. Saya mohon Disnaker maksimalkan upaya agar minimal 75% tenaga kerja berasal dari warga Sidoarjo," tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sidoarjo untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, agar mereka siap masuk ke dunia kerja. Tidak hanya itu, ia juga mendorong pelatihan wirausaha untuk mencetak pelaku UMKM.

"Bekerja tidak harus di perusahaan. UMKM juga bisa menjadi sumber penghasilan dan menyerap tenaga kerja. Maka UMKM harus kita fasilitasi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Sidoarjo, Ainun Amalia, menyampaikan bahwa Job Fair Hybrid 2025 ini juga mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, serta target penyediaan 100 ribu lapangan pekerjaan.

Kegiatan Job Fair ini menggabungkan metode online dan offline. Pelamar dapat mengajukan lamaran secara online sejak 23 hingga 27 Mei, dan bertemu langsung dengan perusahaan saat acara berlangsung.

"Tercatat 5.000 pencari kerja ikut serta, dengan latar belakang pendidikan mulai dari SMA hingga sarjana, untuk posisi mulai staf hingga manajerial," jelasnya.

Dengan metode hybrid, menurutnya, baik perusahaan maupun pencari kerja sama-sama diuntungkan. Pelamar bisa melamar ke banyak perusahaan sekaligus, sementara perusahaan dapat menemukan kandidat yang sesuai secara lebih efisien.

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana membuka Job Fair Hybrid yang berlangsung Selasa 27-28 Mei 2025 di Gedung serbaguna GOR Sidoarjo.

Disampaikan pula, berdasarkan data terbaru BPS, TPT Sidoarjo turun lagi menjadi 5,4% di 2025, dari sebelumnya 6,49%. Jumlah pengangguran pun menurun dari 102 ribu menjadi 79 ribu orang. Ainun berharap pelaksanaan Job Fair Hybrid tahun ini dapat kembali menurunkan angka tersebut.

"Fokus kami adalah peningkatan keterserapan tenaga kerja, bukan sekadar seremoni," pungkasnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan santunan JKK, JHT, JKM, Jaminan Pensiun, dan beasiswa kepada ahli waris buruh yang meninggal dunia atau telah pensiun. Selain itu, sertifikat pelatihan kerja juga diberikan kepada beberapa pencari kerja. ● Loe

CS Scanned with CamScanner

DUTA MASYARAKAT

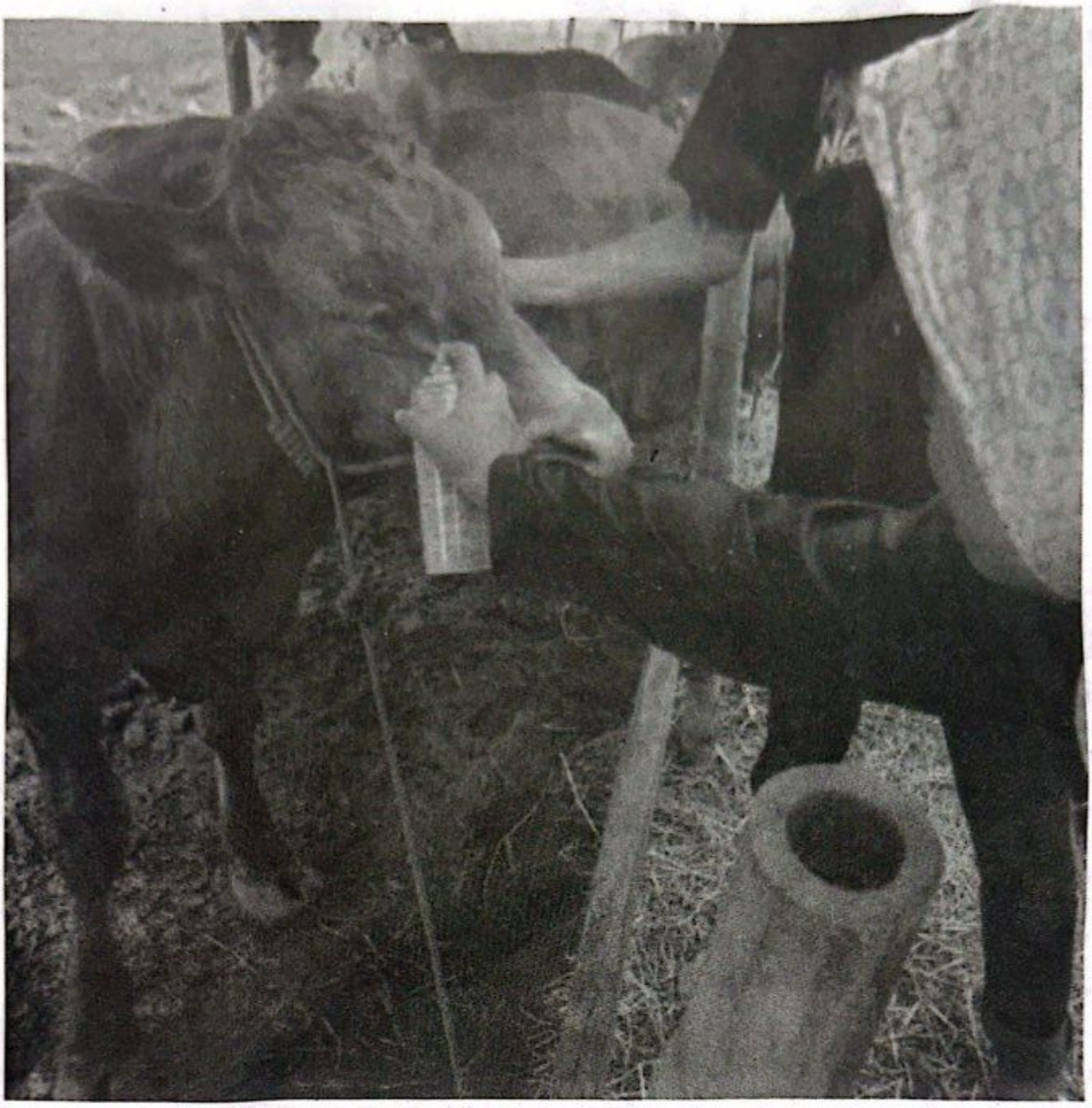

Pemeriksaan Hewan Kurban di Sidoarjo

PETUGAS kesehatan dari Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo memeriksa salah satu mulut hewan kurban di Kawasan Lingkar Timur, Buduran, Sidoarjo, Selasa (27/5/2025). Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi fisik, mata, mulut, dan kuku hewan tersebut untuk memastikan hewan yang dijual layak kurban. **(ant/rus)**

Scanned with CamScanner

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

Terjunkan Tim *Rukyatul Hilal* di 100 Titik

Menag Umumkan Idul Adha Tanggal 6 Juni 2025

Jakarta-HARIAN BANGSA

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Sidang Isbat untuk menentukan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah/2025 Masehi. Hal ini akan turut menentukan kapan Hari Raya Idul Adha 1446 H, beserta hari penting lainnya seperti puasa Arafah.

Sidang Isbat yang digelar Selasa (27/5/2024) resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada 6 Juni 2025.

Pengumuman mengenai keputusan hasil sidang isbat Idul Adha 1446 H disampaikan Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar.

"Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Sehingga 10 Dzulhijjah atau Idul Adha bertepatan pada 6 Juni 2025," kata Nasaruddin dalam konferensi pers hasil Sidang Isbat di Kementerian Agama.

"Alhamdulillah ya, karena di atas 3 derajat ya, berarti sudah (memenuhi syarat) ya," ujar Nasaruddin.

❖ **Bersambung ke Hal. 11**

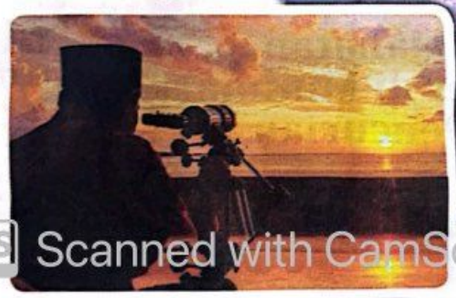

Scanned with CamScanner

Tim rukyatul hilal memantau tinggi bulan sebelum sidang isbat menentukan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah/2025 Masehi dan Hari Raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1446 H, Selasa (27/5/2025).

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

Menag...

Sambungan dari halaman 1

Ia menyebut, potensi terlihatnya hilal cukup besar karena posisinya sudah melebihi kriteria minimal penetapan awal bulan hijriah. "Kita berdoa mudah-mudahan ada yang bisa melihat bulan, terutama di Aceh ya, karena semakin barat kan semakin tinggi derajatnya," jelasnya.

Nasaruddin juga menyampaikan bahwa proses sidang isbat akan berlangsung di Kantor Kementerian Agama dan melibatkan berbagai unsur, termasuk para ulama, pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam, dan perwakilan pemerintah.

Adapun untuk mendukung proses penetapan, Kemenag telah menurunkan tim rukyatul hilal ke berbagai titik di seluruh Indonesia sejak kemarin.

"Kita sudah menyebarkan seluruh Indonesia kemarin itu orang-orang yang bertugas untuk menatap, mengintip hilal atau bulan muda. Mudah-mudahan di antara mereka nanti malam ini ada yang bisa menyaksikan bulan," tuturnya.

Sementara saat ditanya kemungkinan Idul Adha tahun ini akan bersamaan dengan Muhammadiyah, seperti saat Idul Fitri lalu, Nasaruddin menyampaikan harapan senada.

"Insyaallah, berdoa. Nah sekarang ini kan kita barengan semua pihak awal Ramadhan ya kan, lebaran bareng lagi. Mudah-mudahan nanti lebaran Idul Adha sama lagi kita," ungkapnya.

Sebagai informasi, metode yang digunakan Kemenag untuk menentukan 1 Dzulhijjah 1446 H adalah rukyat hilal dengan kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Jika hilal memenuhi kriteria ini dan terlihat di titik-titik pemantauan, maka keesokan harinya akan ditetapkan sebagai 1 Dzulhijjah 1446 H. Jika tidak terlihat, maka bulan Dzulqaidah digenapkan menjadi 30 hari.

Ada tiga rangkaian utama dalam Sidang Isbat penentuan 1 Dzulhijjah 1446 H dan Hari Raya Idul Adha 2025. Pertama, penyampaian posisi hilal alias data hisab oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag.

Data dikumpulkan dari pelaksanaan rukyatul hilal secara langsung di lebih dari 100 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, dilakukan sidang tertutup yang diikuti perwakilan ormas Islam, ahli astronomi, hingga Komisi VII DPR.

Dari sidang tersebut, Kemenag lantas mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan 1 Dzulhijjah 1446 H dan penentuan Hari Raya Idul Adha 2025 kepada masyarakat Indonesia. **(det/mer/lan)**

HARIAN BANGSA
Koran Warga Jatim

Scanned with CamScanner

HEWAN KURBAN

CEK FISIK: Dokter hewan Rina Vitriasari (atas) memeriksa sapi di Jalan Lingkar Timur kemarin (27/5). Hasilnya, tidak ditemukan penyakit menular.

AHMAD REZA/ JAWA POS

Dispaperta Temukan Sapi Lemas di Lingkar Timur

DINAS Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo memeriksa kesehatan hewan

kurban di sejumlah lapak di Jalan Lingkar Timur kemarin (27/5). Hasilnya, ditemukan ada satu sapi dalam kondisi lemas.

Fungsional Medik Veteriner Muda Sub Koordinator Hewan Dispaperta Sidoarjo drh Rina Vitriasari mengatakan, dalam tubuh sapi tersebut tidak ditemukan penyakit menular. "Ada satu ekor sapi yang agak lemas. Identifikasi kami, bukan penyakit menular," ungkapnya.

Rina meminta penjual memberikan vitamin dan diistirahatkan agar kondisinya kembali kuat. "Sapi bisa pulih kembali asalkan setiap harinya tidak menunjukkan gejala yang semakin parah," ujarnya. **(eza/uzi)**

CS Scanned with CamScanner

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KILAS DELTA

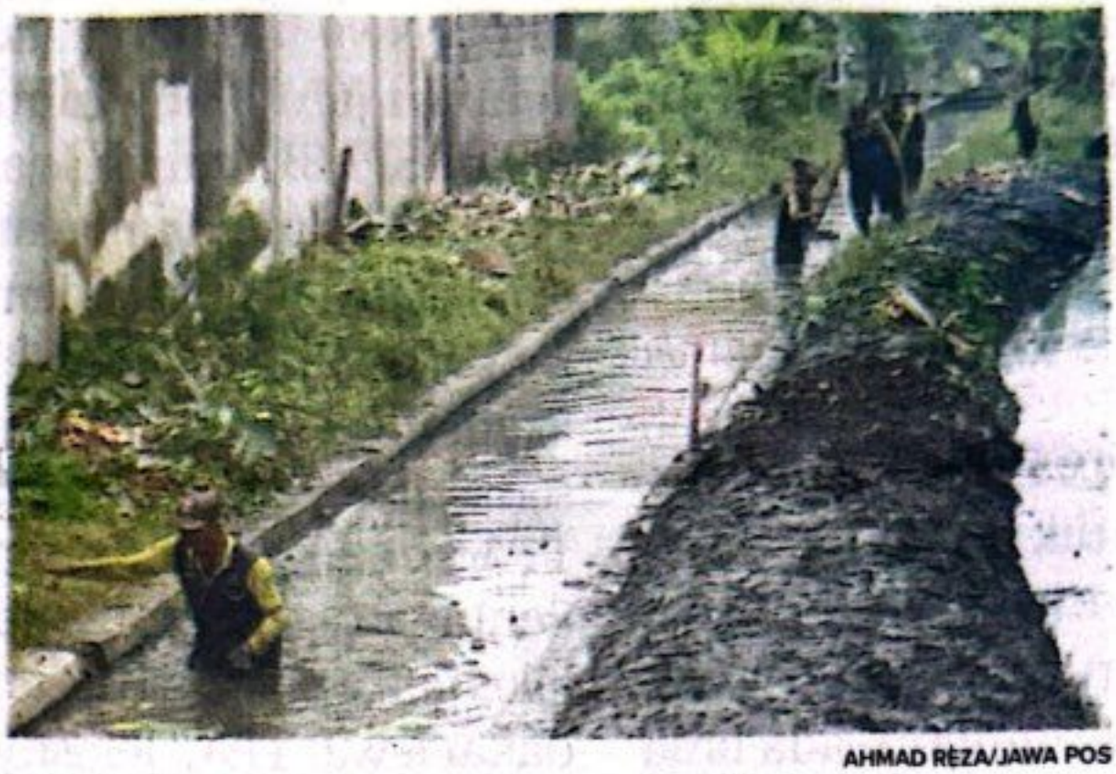

AHMAD REZA/JAWA POS

NORMALISASI: Satgas air membersihkan dua saluran irigasi di Desa Gelam yang mampet kemarin (27/5).

Penuh Sampah, Saluran Irigasi di Desa Gelam Tersumbat

SIDOARJO - Saluran irigasi di Desa Gelam, Kecamatan Candi, tersumbat oleh sampah dan tidak mengalir lancar. Satgas air turun untuk membersihkan.

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana turut mengecek kondisi saluran irigasi itu kemarin (27/5). Mimik mengatakan, ada laporan warga terkait saluran irigasi yang tersumbat. "Kami gerak cepat agar irigasi ini bisa mengalir lagi airnya. Ini cara kerja nyata," katanya.

Menurutnya, masih banyak warga yang sering membuang sampah sembarangan. Termasuk ke sungai atau saluran irigasi. "Kebiasaan itu harus dihentikan," pintanya. **(eza/uzi)**

Jawa Pos

5.000 Pelamar Berebut 1.800 Lowongan Kerja

Dalam Job Fair Hybrid di GOR

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menggelar Job Fair Hybrid di Gedung Serbaguna GOR Delta Sidoarjo kemarin (27/5). Pelamar tembus 5.000 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, dalam sehari kemarin, jumlah pencari kerja ada 5.000 orang. Mayoritas berasal dari lulusan SMA hingga sarjana.

Dirinya menyebut ada 40 perusahaan yang ikut serta. Total tersedia 1.800 lowongan kerja dari 192 posisi, mulai dari staf hingga manajer. *Job fair* tersebut dibuka dalam dua hari hingga hari ini (28/5). "Kami membantu perusahaan menemukan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, saya ingin tingkat pengangguran di Sidoarjo bisa ditekan," jelasnya.

AHMAD REZA/ JAWA POS

BANJIR PELAMAR: Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (tengah) meninjau stan perusahaan dalam Job Fair Hybrid di GOR Delta Sidoarjo kemarin (27/5).

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana yang turut hadir kemarin menyebut, isu pengangguran masih krusial meski persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sudah turun. Mimik memaparkan, TPT pada 2023 mencapai 8,05 persen. Turun menjadi 6,49 persen di 2024.

"Sidoarjo ini daerah industri, dikelilingi perusahaan besar, tapi pengangguran masih tinggi," ungkapnya. Mimik meminta Disnaker mendorong perusahaan untuk memprioritaskan warga Sidoarjo sebagai tenaga kerja. "Setidaknya minimal 75 persen karyawan perusahaan di Sidoarjo adalah warga lokal," katanya. **(eza/uzi)**

Jawa Pos

MK Putuskan SD dan SMP Harus Gratis

- Hakim Sebut Negara Memiliki Kewajiban Konstitusional Biayai Pendidikan Dasar
- Tidak Berlaku pada Sekolah atau Madrasah Swasta Elite

"Kondisi sekolah/madrasah swasta di Indonesia tidak bisa disamaratakan sebab kondisi pembiayaannya berbeda-beda."

ENNY NURBANINGSIH
Hakim Konstitusi

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) menjamin pendidikan dasar warga negara dengan tidak menarik pungutan apa pun.

Baca MK... Hal 2

Jurney Klaim Stairlift di Borobudur Sesuai Standar UNESCO

Jawa Pos

MK Putuskan SD dan SMP Harus Gratis

Sambungan dari hal 1

Dengan kata lain, pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMP harus gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Hal itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, kemarin (27/5). Gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tersebut diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga pemohon individu lain.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang kemarin.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai bahwa pemerintah wajib menggelar pendidikan dasar tanpa memungut biaya. "Baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," tambahnya.

Pemda yang dimaksud dalam putusan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23/2014. Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa pendidikan SD-SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Guntur Hamzah menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar. Hal itu sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara mendapat hak pendidikan dasar.

Adanya kewajiban membayar biaya pendidikan, lanjut dia, berpotensi menghambat upaya warga negara untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Lebih lanjut, MK juga menyoroti bahwa bantuan keuangan negara selama ini hanya difokuskan pada sekolah negeri.

Padahal, secara faktual, banyak anak Indonesia yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta atau madrasah swasta. "Negara tidak boleh lepas tangan atau mengalihkan tanggung jawab pembiayaan kepada penyelenggara pendidikan swasta," kata dia.

Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 diajukan JPPI bersama tiga pemohon perorangan. Mereka adalah Fathiyah, Novianisa Rizkika dan Riris Risma Anjiningrum. Mereka meminta agar pendidikan dasar 9 tahun (SD-SMP) digratiskan, tidak hanya pada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.

Tidak Bisa Disamaratakan

MK juga menyatakan bahwa pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta tidak berlaku pada sekolah atau madrasah swasta elite, atau sekolah yang menerapkan kurikulum khusus.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyadari bahwa kondisi sekolah/madrasah swasta di Indonesia tidak bisa disamaratakan sebab kondisi pembiayaannya berbeda-beda. Dalam kasus tertentu, ada sekolah swasta yang memang bersifat khusus sehingga masih dapat melakukan pungutan biaya kepada peserta didik.

"Seperti kurikulum internasional atau keagamaan yang merupakan kekhasan atau dijadikan nilai jual (selling point) keunggulan sekolah dimaksud," ujarnya.

Enny menyadari bahwa sekolah tersebut selama ini menerapkan biaya yang secara sadar dipilih oleh orang tua murid, sehingga tidak dianggap sebagai pembatasan. Untuk itu, MK menyarankan agar pemerintah mengutamakan alokasi anggaran pendidikan dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dari sekolah/madrasah swasta tersebut, agar bantuan pendidikan dari pemerintah berjalan efektif.

Sejarah Baru

Koordinator Nasional JPPI menyambut gembira putusan MK. Ia menyebutnya sebagai sejarah baru bagi pendidikan Indonesia.

"Ini adalah kemenangan monumental bagi hak asasi manusia atas pendidikan," paparnya dalam keterangannya di Jakarta kemarin. "Sekaligus penegasan bahwa negara wajib hadir memastikan pendidikan dasar yang berkualitas, inklusif, dan bebas biaya bagi seluruh anak bangsa, tanpa memandang apakah sekolah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun masyarakat (swasta)."

Lebih lanjut, Ubaid mengungkapkan bahwa putusan ini membuka jalan bagi berakhirnya diskriminasi pembiayaan pendidikan yang selama ini membebani jutaan keluarga. Selain itu, putusan ini dapat menjadi pengakuan bahwa anggaran 20 persen pendidikan dari APBN dan APBD akan benar-benar dialokasikan secara adil untuk pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Menyusul putusan MK tersebut, JPPI menyerukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan sistematis. Di antaranya, melakukan integrasi sekolah swasta dalam sistem penerimaan murid baru online.

Dengan adanya keputusan MK itu, pemerintah juga didorong untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pungutan. Sebab, selama ini masih terjadi pungutan di sekolah yang disebut-sebut sudah gratis dan dibiayai negara.

"Sanksi tegas harus diberikan kepada pihak-pihak yang masih memungut biaya dari siswa setelah putusan ini," tuturnya.

Di samping itu, sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh kepada publik dan sekolah oleh pemerintah terkait putusan MK tersebut, sehingga sekolah dan orang tua bisa memahami hak dan kewajiban barunya terkait pembiayaan pendidikan. **(far/mla/ttg)**

Jurney Klaim Stairlift di Borobudur Sesuai Standar UNESCO

Jawa Pos

Sambungan dari hal 1

lansia atau penyandang disabilitas saat naik dan sudah umum diterapkan di beberapa destinasi wisata "dikrawuk (tangan sedikit mencakar, Red)" istrinya

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

M SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

DISERBU: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat mengunjungi stan penyedia lowongan kerja.

1.800 Lowongan Kerja dan 192 Posisi Jabatan Diserbu Pencari Kerja

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Job Fair Hybrid di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diserbu ribuan pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengungkapkan, pengangguran masih menjadi persoalan serius di Kota Delta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Sidoarjo menurun dari 8,05 persen pada 2023 menjadi 6,49 persen pada 2024.

"Meski mengalami penurunan, Sidoarjo masih mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Ini menjadi perhatian serius bagi kami," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Selasa (27/5).

Ia menyayangkan tingginya angka pengangguran di tengah banyaknya perusahaan besar di wilayah Sidoarjo. Karena itu,

● Ke Halaman 10

Scanned with CamScanner

RADAR SIDOARJO.ID

1.800 Lowongan Kerja...

ia meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo bekerja lebih maksimal dalam menekan angka pengangguran.

"Saya ingin minimal 75 persen karyawan perusahaan di Sidoarjo adalah warga lokal," tegas Mimik.

Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, menjelaskan bahwa Job Fair ini bertujuan mempertemukan pencari kerja dan industri secara langsung, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien.

"Kami membantu perusahaan menemukan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Harapannya, tingkat pengangguran di Sidoarjo bisa terus ditekan," ujarnya.

Dengan sistem hybrid, para pencari kerja dapat mengakses informasi lowongan kerja secara lebih luas, serta mengirim lamaran ke banyak perusahaan dalam waktu bersamaan. "Tahun ini ada 40 perusahaan yang berpartisipasi, dengan total 1.800 lowongan kerja dari 192 posisi, mulai dari staf hingga manajer," terangnya.

"Hari ini jumlah pencari kerja mencapai 5.000 orang, mayoritas merupakan lulusan SMA hingga sarjana," pungkas Ainun. (sai/vga)

Scanned with CamScanner

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo: Idealnya Job Fair Libatkan Lebih Banyak Perusahaan Padat Karya

28 Mei 2025 05:30

Fathur Roziq, Fathur Roziq
Redaksi Ketik.co.id

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih berdiskusi dengan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana dan Kepala Disnakertrans Sidoarjo Ainun Amalia di arena Job Fair Hybrid 2025 di GOR Serba Guna Sidoarjo pada Selasa (27 Mei 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan

Aa

KETIK, SIDOARJO – Job Fair Hybrid 2025 mendapatkan apresiasi sekaligus evaluasi dari DPRD Sidoarjo. Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan mendukung upaya Disnakertrans Sidoarjo untuk menurunkan angka pengangguran. Namun, upaya-upaya itu tetap disertai kesungguhan untuk selalu mengutamakan warga Sidoarjo sendiri.

"Jangan sampai kalau ada *job fair* seperti ini justru yang mengikuti lebih banyak pelamar-pelamar dari luar daerah. Sementara angka pengangguran kita masih tinggi," ungkap Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih setelah menghadiri Job Fair Hybrid 2025 di GOR Serba Guna Sidoarjo pada Selasa (27 Mei 2025).

Dengan fungsi *budgeting* lembaga legislatif, lanjut Abdillah Nasih, DPRD Sidoarjo siap mendukung kebijakan-kebijakan Disnakertrans Sidoarjo. Sekaligus men-support anggarannya dalam pembahasan APBD.

Dukungan kebijakan itu, antara lain, evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah terkait ketenagakerjaan. Evaluasi bertujuan semakin memudahkan warga Sidoarjo dalam melamar pekerjaan. Tentu sekaligus bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo.

"Kita akan evaluasi bagaimana, misalnya, ada kewajiban perusahaan mengutamakan orang Sidoarjo," tegas mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo tersebut.

Evaluasi lainnya terkait dengan pelatihan-pelatihan. DPRD Sidoarjo, lanjut legislator PKB Sidoarjo itu, ingin memperoleh peta yang jelas. Pengganggguran itu sebagian besar ada di mana, di sektor apa, dan potensi daerahnya apa. Dengan begitu, pelatihan akan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Baca Juga:
Dukung Program Bupati Sidoarjo, Job Fair Hybrid 2025 Buka 1.800 Lowongan Kerja

Abdillah Nasih mencontohkan Kecamatan Tanggulangin. Kebutuhan utama daerah itu ialah regenerasi perajinn kulit. Produsen tas, sepatu, atau lainnya. Daerah Waru, misalnya. Pelatihan di kawasan Wedoro tentu terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) daerah itu sebagai produsen sandal terbesar.

"Kita dulu trauma karena tidak adanya pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja setempat," terang Abdillah Nasih yang juga ketua DPC PK Sidoarjo tersebut.

"Jadi, pelatihan-pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing," ujar Abdillah Nasih.

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Wabup Mimik Idayana berbincang dengan salah satu perusahaan penyedia lowongan kerja dalam Job Fair Hybrid di GOR Delta Serba Guna pada Selasa (27 Mei 2025). (Foto: Fathur Raziq/Ketik.co.id)

Ditanya soal kemungkinan gelombang PHK di Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengajak Disnakertrans Sidoarjo segera berkumpul dengan *stakeholders* lain. Bersama-sama memecahkan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) ini.

Banyak perusahaan yang telah berkiprah di Kabupaten Sidoarjo. Mereka terbukti telah berkontribusi bagi daerah. Sudah sepantasnya perusahaan-perusahaan tersebut diberi kemudahan. Misalnya kemudahan berbagai perizinan. Selain itu, perlu ada insentif atau stimulus khusus, seperi keringanan pajak.

Baca Juga:
Wabup Sidoarjo Mimik Idayana: Keterbukaan Informasi Kunci Kemajuan Peradaban

"Yang penting ada *take and give* antara perusahaan dan pemerintah daerah," tutur legislator DPRD Sidoarjo asal Waru tersebut.

Di sisi lain, mereka juga dilibatkan dalam *job fair* dengan prioritas perusahaan-perusahaan yang padat karya. Agar peluang untuk mengurangi tingkat pengangguran semakin besar. Kalau target lowongan kerja 3 ribu, tapi perusahaan hanya menerima 6 atau 4 pencari kerja, target tidak akan tercapai.

Dituding Lakukan praktik Jual Beli Jabatan,Bupati Subandi Didemo Massa KCB

dimensin | 27 Mei 2025, 12:33 pm | 0 comments | 142 views

Karena tuntutan untuk bisa bertemu dan mengajak berdialog terbuka dengan Bupati Subandi tak terpenuhi.Masa pengunjuk rasa akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan membakar ban.

Kordinator aksi unjuk rasa Cholik Ferdiansyah saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.(Dil)

DIMENSINEWS.COM SIDOARJO; Puluhan massa berbagai elemen yang tergabung dalam wadah Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Selasa (27/5) pagi hingga siang tadi melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan.

Dengan mobil komando, puluhan pengunjuk rasa yang sebagian besar didominasi oleh anak muda tersebut menyasar kantor Kejaksaan Negeri serta Gedung Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sambil membentangkan dua spanduk besar berukuran 1×6 meter bertuliskan selain dukungan terhadap upaya kejaksaan yang telah mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat Kades Tambak Sawah,Imam Fauzi dan beberapa pejabat lain dalam kasus pengelolaan Rusunawa yang merugikan negara tak kurang dari Rp 9.7 miliar tersebut.

Dalam orasinya,mereka mendesak aparat kejaksaan untuk mengusut juga 4 mantan Kepala Dinas (Kadin) PU Cipta Karya,Perumahan, Permukiman, antaranya Ir. Sulaksono,yang menjabat periode 2008 – 2011, dan periode 2018-2021, Dwijo Prawiro periode 2012-2014, Agoes Boedi Tjahjono periode 2015-2017, serta Heri Soesanto yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Cipta Karya pada tahun 2022.

"Para mantan Kadis ini diduga kuat mengetahui serta terlibat dalam praktik korupsi yang dilakukan Kades beserta kroni-kroninya.Untuk itu kami minta aparat kejaksaan untuk tidak tebang pilih dalam menangani perkara ini"teriaknya.

Setelah sekitar satu jam melakukan orasi secara bergantian di gerbang masuk kantor kejaksaan,puluhan massa pengunjuk rasa memutuskan untuk melanjutkan aksinya ke kantor Bupati Sidoarjo tanpa ada kesepakatan apapun.

Untuk yang kedua kalinya,dua kordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa secara bergantian kembali melakukan orasi.

Kali ini mereka menghujat kebijakan Bupati Sidoarjo, Subandi terkait salah satu kebijakan penempatan serta penunjukan puluhan pejabat sebagai Pejabat Pelaksana tugas (Plt) di sejumlah Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyalahi aturan perundangan.

Mereka menuding Bupati Subandi sengaja melakukan praktik kolusi dengan menempatkan sejumlah pejabat sebagai Pejabat Pelaksana tugas (Plt) di sejumlah OPD strategis tanpa mengindahkan aturan perundangan-undangan.

"Kebijakan Bupati Subandi yang dengan seenak perutnya menempatkan kroni-kroninya sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) di lintas OPD adalah indikator telah terjadi praktek kolusi di internal birokrasi pemerintahan Sidoarjo saat ini"teriak Cholik Ferdiansyah,Korlap aksi unjuk rasa.

Menurutnya praktek penunjukan seperti itu jelas menabrak Permen PANRB No 22 Tahun 2021 dan SE BKN No 1/SE/1/Tahun 2021 serta Laporan hasil Review Inspektorat Sidoarjo No 700.1.2.7/3366/438.4/2024 tentang aturan,mutasi dan penempatan pejabat ASN.

"Maka kami dengan tegas menghimbau kepada Bupati dan semua pejabat pengambil kebijakan untuk menghentikan semua praktik kolusi dan nepotisme.Bila dalam waktu dekat ini tidak ada tindakan apapun.Kami akan terus lakukan aksi unjuk rasa serupa dengan massa lebih besar"tegas Cholik.

Kesal karena aksi tuntutan mereka untuk bertemu dengan Bupati Subandi tak mendapatkan tanggapan.Massa pengunjuk rasa akhirnya melanjutkan aksinya dengan membakar ban bekas.

Aksi bakar ban ditengah jalan tersebut tak pelak menambah aksi unjuk rasa semakin panas.

Korlap aksi,Cholik menolak mentah-mentah tawaran Sekretaris Daerah (Sekda) Fenny Apridawati,yang disampaikan petugas SatpolPP untuk melakukan dialog di ruang kerjanya.

"Kami hanya akan bersedia bertemu dan berdialog diluar kantor saja.Agar semua

masyarakat terutama teman-teman media bisa mengetahui apa isi dan keputusan semua tuntutan kami. Bila mereka tidak bersedia silahkan saja.Kami akan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan"papar Cholik kepada sejumlah awak media yang menemuinya usai aksi.

Hingga lepas waktu Dzuhur, massa pengunjuk rasa akhirnya terlihat membubarkan diri tanpa ada kesepakatan sebagaimana point tuntutan.(Dilla)

Wabup Sidoarjo Hj.Mimik ,Sidak Kelayakan Unit Damkar di Kantor BPBD Kabupaten Sidoarjo, Sirinenya Kurang Keras.

Redaksi
Mei 27, 2025

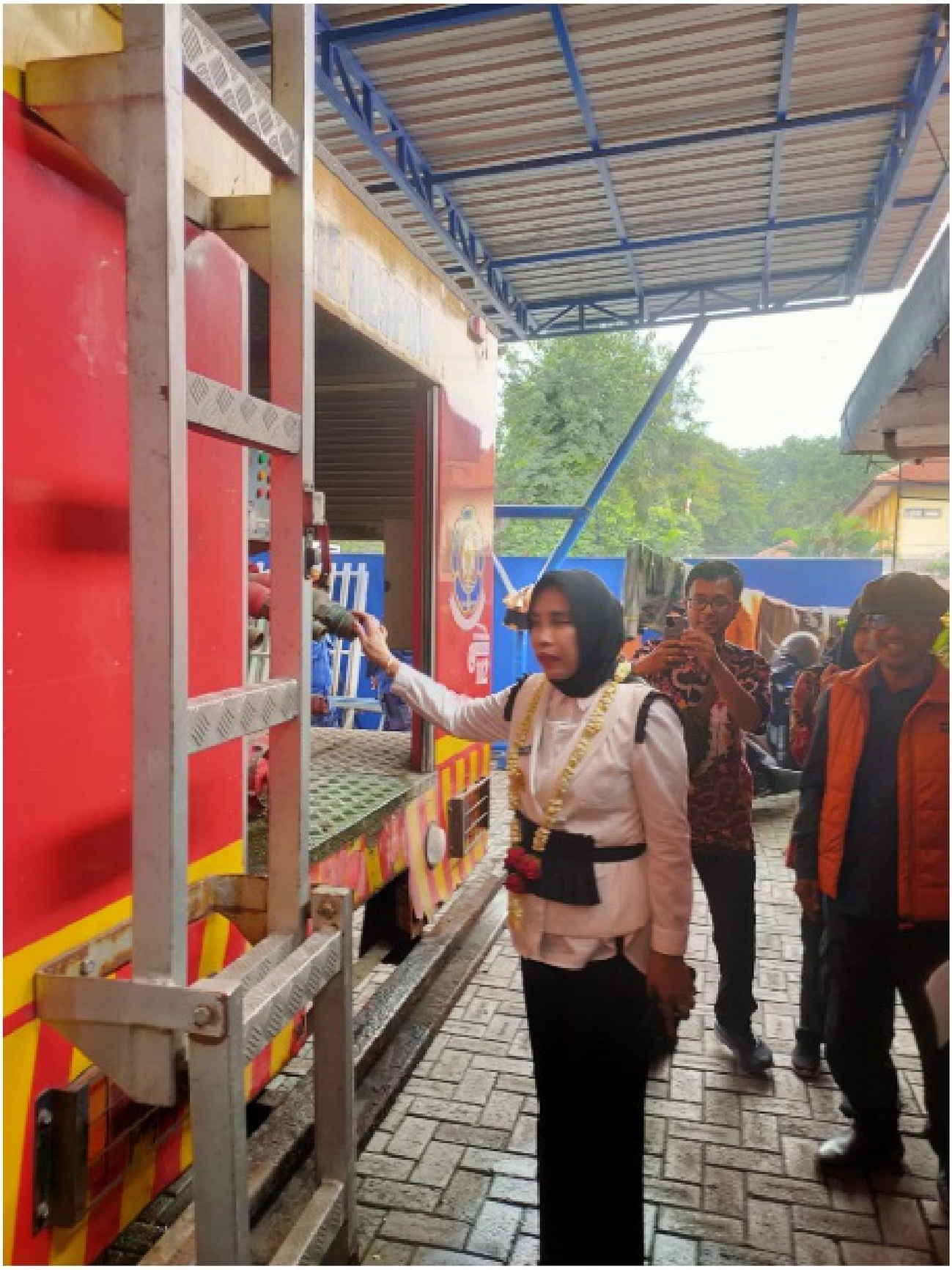

Siarpos.com.Sidoarjo – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengecek armada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sidoarjo, Selasa (27/5/2025).

Diketahui saat ini Sidoarjo memiliki 13 Mobil Pompa dengan kapasitas 5.000 L, yang tersebar pada 6 Lokasi Pos Damkar diantaranya di Sidoarjo Kota, Waru, Candi, dan Porong.

Ada unit armada damkar yang mengalami kebocoran pada selang pompa nya dimana kondisinya rata-rata sekitar 60% dan dikhawatirkan air akan habis sebelum unit armada damkar tiba di lokasi kejadian.

Karena itu, sekarang sedang pengajuan anggaran agar dapat dilakukan perawatan lebih lanjut.

Wabup Hj. Mimik Idayana pun menyampaikan bahwa unit armada damkar tersebut suara sirinenya juga kurang kencang. Padahal itu penting agar pengguna jalan dengar dan memberi jalan saat damkar melintas.

Untuk alat pelindung diri berupa baju safety dan pakaian dinas lapangan, diketahui terakhir kali pengadaan pada tahun 2022 dan untuk sepatu pada tahun 2021.

Mimik juga mengecek layar yang memonitor bencana gempa yang terjadi yaitu Automatic Weather Station dimana yang ditampilkan masih system besar nya dan perlu berkomunikasi lagi dengan BMKG Juanda untuk menyiapkan system local nya khususnya untuk memonitor kejadian gempa di Sidoarjo.

Menurut Muhammad Qodari, Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Sidoarjo, selama pihaknya terus memonitor kejadian gempa secara manual melalui relawan-relawan yang ada di desa dan kecamatan yang mengupdate informasi kejadiannya.

Wabup Hj. Mimik Idayana juga mengecek tempat pemulihan tenaga untuk beristirahat yang tersedia di sana. Terlihat masih ala kadarnya, bahkan tempatnya panas dan kasurnya juga panas.

"Yang sabar ya Pak, kerja yang ikhlas dengan rasa sosial. Nanti akan kita perbaiki karena Bapak-bapak ini yang bekerja di lapangan kalau masyarakat lagi membutuhkan karena dengan gerak cepat maka banyak yang akan terselamatkan," ucapnya.

Wabup Hj. Mimik Idayana juga mengecek beberapa kendaraan lainnya diantaranya mobil pemadam kebakaran kecil tahun 2012, mobil angkut peralatan logistik, dan perahu-perahu.

"Untuk usulan-usulan anggaran perawatan mohon segera diajukan dan tetap semangat, tetap bantu Sidoarjo lebih baik lagi," ucapnya. (Cak Sokran)

Ketua DPRD Sidoarjo Beri Pandangan Kebijakan Ketenagakerjaan

Redaksi 3 Min Baca
27 Mei 2025

Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Ketua DPRD Sidoarjo beri pandangan kebijakan Ketenagakerjaan. Abdillah Nasih selaku ketua DPRD Sidoarjo memberikan Pandangan terkait ketenagakerjaan yang ada di Sidoarjo saat ini. Kehadirannya dalam pembukaan "Job Fair Hybrid" sebuah event perekrutan yang menggabungkan format online dan offline pada Selasa (27/5/2025) di gedung serbaguna GOR Sidoarjo. Ini berarti pencari kerja dapat berpartisipasi dalam acara tersebut baik melalui platform digital (misalnya, melalui aplikasi atau website) maupun dengan menghadiri acara fisik secara langsung.

Abdillah Nasih ketika di temui Arjunanusantaranews.com menyampaikan telah memberikan apresiasi kepada eksekutif maupun Disnaker yang terus greget mengurangi angka pengangguran. Yang jelas telah menurun dari angka 6.8 persen, dalam gerakan program semacamnya (Jon Fair Hybrid) ini patut terus di apresiasi.

" Dan kami dari DPRD ini akan terus mendukung penuh baik dari segi Kebijakan atau penganggaran".

Ketua DPRD Sidoarjo beri pandangan kebijakan Ketenagakerjaan Sidoarjo. Kita akan coba nanti evaluasi di Perda – Perda yang sekiranya ini harus dibikin kemudahan-kemudahan kepada warga Sidoarjo bisa melamar dan bisa diterima di perusahaan- perusahaan yang ada di Sidoarjo. Dan jangan sampai kemudian dengan adanya model Job Fair Hybrid ternyata prosentase yang mengikuti banyak di luar daerah.

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sementara angka pengangguran kita masih cukup tinggi. Kita akan coba evaluasi diwajibkan atau bagaimana sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Sidoarjo ini adalah lebih mengakomodir warga – warga Sidoarjo.

Yang kedua adalah pelatihan- pelatihan, kita kepingin nanti agar jumlah pengangguran itu ada dimana dan sektor apa, maka pelatihan pelatihan akan disesuaikan. Misalkan di deretan tanggulangin, kebutuhannya adalah terkait regenerasi pengrajin kulit ataupun untuk tas dan macam-macam maka pelatihannya fokus disitu.

Seperti di daerah Waru misalkan, persoalan pengangguranya adalah kerena terkait dengan masalah SDM untuk meneruskan logam misalkan, kita dulu trauma dengan kasus yang ada di Wedoro yang punya banyak UKM terkait dengan Ketenagakerjaan masalah ini, karena tidak ada pembinaan dan pelatihnya sangat minim. Ini menjadi pelajaran berat buat kita. Sehingga pelatihan-pelatihan kedepan buat mitra kerja harus di sesuaikan kebutuhan – kebutuhan di daerah masing-masing.

Masih disampaikan oleh Abdillah Nasih dalam menyikapi kekhawatiran Dinas tenaga kerja, bahwa akan banyak PHK pada tahun- tahun berikutnya. Abdillah memberikan solusi bahwa kita pingin mengajak Disnaker kumpul bersama dengan perusahaan- perusahaan untuk sama- sama memecahkan persoalan apakah di pakai semacam sistim mulus, intensif khusus dengan perusahaan- perusahaan besar itu, apalagi yang sudah koneksi pada daerah, kemudian ada perizinan, masalah pajak yang penting bagaimana take and give antara perusahaan-perusahaan itu dengan pemerintah daerah, ini mencegah hal-hal semacam itu.

Termasuk mungkin juga terobosan-terobosan di buceng-buceng yang padat karya bisa mengurangi angka tersebut.

Evaluasi terhadap stand- stand yang telah dilihat, bahwa kami tadi telah melihat kurangnya perusahaan-perusahaan terkait yang di rekrut oleh Disnaker, sehingga perusahaan-perusahaan yang padat karya. Kalau targetnya tiga ribu tetapi perusahaan-perusahaan yang hadir hanya empat, lima atau enam apa mungkin tercapai. Kita dorong nanti agar perusahaan-perusahaan yang lebih besar ikut andil, pungkasnya.

RADAR SIDOARJO.ID

Dampingi Wakil Bupati Sidoarjo di Job Fair Hybrid, Inilah Pandangan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Terkait Job Fair Hybrid

RedSidoarjo Mei 28, 2025

Liputan5news.com - Sidoarjo. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih mendampingi Wakil Bupati Sidoarjo di acara pembukaan Job Fair Hybrid yang digelar oleh Pemkab Sidoarjo. Job Fair Hybrid di tahun 2025 ini diikuti 40 perusahaan. Ada 1.800 lowongan pekerjaan dengan 192 jabatan yang bisa dilamar. Job Fair Hybrid 2025 digelar mulai tanggal 27 sampai 28 Mei 2025 di gedung serbaguna GOR Sidoarjo. Bursa kerja terbuka ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana dengan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih.

Usai dilakukan pembukaan, wakil bupati Sidoarjo dengan didampingi ketua DPRD kabupaten Sidoarjo meninjau ke stand - stand peserta bursa kerja.

Setelah selesai meninjau stand - stand bursa kerja, awak media sempat menemui Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih.

Disinggung mengenai pandangan DPRD dengan adanya Job Fair Hybrid ini, Abdillah Nasih menyampaikan :

Pertama tama kita ngasih apresiasi kepada eksekutif dan disnaker yang terus mengerucut untuk mengurangi angka pengangguran kita. Alhamdulillah sudah menurun hingga menjadi 6,8 persen. Job fair Hybrid seperti ini perlu kita apresiasi. Kami dari DPRD akan terus mendukung penuh referensi kebijakan maupun penganggaran. Kita akan coba evaluasi di perda - perda yang memberikan kemudahan kepada warga Sidoarjo yang melakukan pelamaran pekerjaan bisa di terima di perusahaan - perusahaan yang ada di Sidoarjo. Jangan sampai adanya Job Fair Hybrid seperti ini ternyata prosentase yang mengikuti banyak dari luar daerah, sementara itu angka pengangguran di daerah kita masih tinggi. Ke depannya akan kita evaluasi sehingga perusahaan yang ada di Sidoarjo ini lebih mengakomodir warga Sidoarjo.

RADAR SIDOARJO.ID

"Kedua pelatihan - pelatihan, dalam hal ini kita harus mengetahui jumlah pengangguranya ada di mana dan di sektor apa, maka pelatihannya harus disesuaikan. Misalkan di daerah Tanggulangin kebutuhannya adalah perlunya regenerasi pengrajin kulit perusahaan tas dan lain - lain maka pelatihannya harus di pusatkan di situ. Di daerah waru misalnya masalah pengangguranya karena terkait SDM untuk meneruskan pengrajin logam.

Lanjut Nasih kita trauma di kasus di Wedoro yang banyak UKM terkait ketenaga kerjaan, masalah ini terjadi karena tidak ada pelatihan atau pembinaan yang sangat minim. Ini menjadi pengalaman berharga bagi kita, sehingga pelatihan - pelatihan tenaga kerja ini disesuaikan dengan kebutuhan - kebutuhan di daerah kecamatan masing - masing.

"Terkait evaluasi stand kami tadi melihat masih kurangnya perusahaan yang direkrut oleh Disnaker. Paling tidak Disnaker harus merekrut perusahaan - perusahaan yang padat karya. Kalau targetnya lowongan pekerjaan 3.000 sementara perusahaan yang butuh lowongan pekerjaan hanya lima atau empat, bagaimana bisa tercapai. Kita dorong nanti agar perusahaan - perusahaan lebih besar ikut andilnya," jelasnya.

Ketika disinggung kekhawatiran dinas tenaga kerja akan adanya PHK di tahun tahun berikutnya Abdilah Nasih menyampaikan kita ingin disnaker berkumpul bersama dengan perusahaan - perusahaan di Sidoarjo untuk mencari persoalan - persoalan yang terjadi, apakah dipakai semacam stimulus, insentif khusus sehingga perusahaan - perusahaan besar yang sudah memberi kontribusi kepada daerah baik itu mengenai pajak maupun perijinan, paling tidak ada take and give antara perusahaan itu kepada pemerintah daerah. Termasuk dalam hal ini terobosan - terobosan ke perusahaan padat karya sehingga bisa mengurangi pengangguran.

Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menyampaikan Job Fair Hybrid 2025 ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di kabupaten Sidoarjo. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kabupaten Sidoarjo masih menjadi isu krusial.(Yanti)

RADAR SIDOARJO.ID

“Disambati” Finansial Deltras, Cak Nasih Fasilitasi Cari Sponsorship

Ketua DPRD Sidoarjo Terima Audensi Deltamania

KEADILAN 05/28/2025
Berita, DPRD, Jawa Timur, Sidoarjo 2472 Dilihat

Dicky Pramono, radarkeadilan.com

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jawa Timur, Sidoarjo, Radar Keadilan – **Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih S.M menerima kunjungan rombongan pengurus Deltamania Sidoarjo, pada Selasa (27/5/2025) sore.**
Dalam audensi, kedua pihak membahas berbagai permasalahan menyelimuti Deltras FC yang merupakan tim sepakbola kebanggaan masyarakat Sidoarjo.

Kedatangan rombongan pengurus suporter mulai tingkat kordinator kecamatan hingga kabupaten dipimpin ketua Deltras FC Syaiful Baqirok tiba di kantor DPRD pukul 15.00, yang langsung ditemui Cak Nasih, sapaan ketua DPRD Sidoarjo. Pertemuan kedua pihak berlangsung begitu gayeng selama sekitar satu jam.

Dalam kesempatan itu, Syaiful Baqirok mengurai berbagai permasalahan yang tengah dihadapi tim sepakbola kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Mulai dari permasalahan sewa stadion Delta yang mahal sebagai homebase hingga menyangkut krisis finansial.

"Intinya, Deltras saat ini menghadapi krisis keuangan. Nggak duwe duit menghadapi musim tahun ini, padahal targetnya harus lolos ke Liga 1," kata Baqirok.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menghadap ke pimpinan legislatif ini berharap mendapat perhatian, sekaligus dibantu mencari solusi menyelesaikan permasalahan tim sepak bola yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Sidoarjo.

"Kami ingin Deltras tetap di Sidoarjo. Kami menghargai apa yang menjadi keinginan deltamania telah direspon poisitif ketua DPRD," ujarnya.

RADAR SIDOARJO.ID

“Semoga segera ada solusi sehingga Deltras dalam mengarungi Liga 2 tahun ini mampu berprestasi dan menembus Liga 1 untuk musim depan sesuai harapan kami,” tambah Baqirok.

Sementara itu, Cak Nasih memahami keresahan Deltamania, terkait permasalahan yang dihadapi Deltras FC. Apalagi tim sepakbola ini sudah menjadi kebanggaan, bahkan sudah seperti milik masyarakat Sidoarjo. Apalagi menilik perjalanan awal, tim sepak bola ini merupakan milik Pemkab Sidoarjo, sebelum akhirnya beralih menjadi klub profesional yang dikelola manajemen PT Delta Raya Sidoarjo.

“Jadi wajar masyarakat Sidoarjo yang cinta bola ikut resah atas permasalahan Deltras. Kita pun tentunya berkeinginan sama, agar Deltras dapat berprestasi lebih,” ujarnya.

“Jika musin tahun ini bermain di Liga 2, maka tahun depan harus mampu menembus Liga 1,” tambah Cak Nasih.

Soal permasalahan dihadapi Deltras, Cak Nasih mengatakan pihaknya segera membahas bersama eksekutif sebagai upaya mencari solusi yang tepat. Terutama membantu mengatasi krisis finansial Deltras sebagai persiapan memasuki Liga 2 musim 2025/2026.

“Kalau dibantu dana dari APBD, itu jelas tidak mungkin, karena aturannya memang dilarang. Namun kami pastikan banyak solusi yang dapat dilakukan,” ujarnya.

“Dan kami segera membahasnya bersama Pak Bupati, maupun dengan Pak Amir (manajemen Deltras, red) sepulang dia beribadah haji,” ujarnya.

RADAR SIDOARJO.ID

Lebih lanjut, pimpinan legislatif juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini membeberkan berbagai terobosan sebagai langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Deltras. Di antaranya menggandeng perusahaan di wilayah Sidoarjo sebagai sponsorship, dalam hal ini pihaknya bersama eksekutif siap menjadi fasilitator.
Hal ini, lanjut dia, sangat memungkinkan dilakukan, apalagi di Sidoarjo banyak perusahaan besar yang bisa digandeng sebagai sponsorship.

"Dan itu urusannya sudah Ji tu Ji antara pihak perusahaan dan manajemen Deltras, sedang kami sifatnya hanya memfasilitasi saja," ujarnya.

Alternatif lain, lanjut dia, untuk menyelesaikan krisis finansial pihak manajemen bisa menjual sahamnya ke publik. Seperti pernah dilakukan Mitra FC yang menjual sahamnya kepada masyarakat Surabaya dalam mengatasi persoalan finansial.

"Itu bisa ditiru manajemen Deltras dengan menjual sahamnya ke masyarakat maupun perusahaan di Sidoarjo. Benefitnya lagi akan semakin tumbuh rasa memiliki Deltras," ucapnya.

Soal homebase, pihaknya berharap tim sepakbola yang sudah identik, bahkan telah menjadi bagian dari ikon Kota Delta ini tetap berada di Sidoarjo. Begitu pula soal keluhan tingginya tarif sewa Stadion Delta sebagai homebase Deltras, tentunya dapat dibicarakan lagi bersama Pemkab Sidoarjo.

"Jadi tidak ada alasan Deltras hengkang dari Sidoarjo. Semua permasalahan pasti ada solusinya," tegas Cak Nasih. (*/Dicky)

Ketua DPRD Sidoarjo : Kasik Langkah Strategis yang Dapat Dilakukan untuk Menyelesaikan Permasalahan Deltras

Iswin Arrizal – Rabu, 28 Mei 2025 | 05:59 WIB

Ketua DPRD Abdillah Nasih, Zahlul Yusar bersalaman Baktirok Ketua Deltamania (Foto : Amar DPRD Sidoarjo)

Sidoarjo, Cakrawala.co – Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih S.M menerima kunjungan rombongan pengurus Deltamania Sidoarjo, pada Selasa 27 Mei 2025 sore. Dalam audensi, kedua pihak membahas berbagai permasalahan menyelimuti Deltras FC yang merupakan tim sepakbola kebanggaan masyarakat Sidoarjo.

Kedatangan rombongan pengurus suporter mulai tingkat kordinator kecamatan hingga kabupaten dipimpin ketuanya, Syaiful Baqirok tiba di kantor DPRD pukul 15.00, yang langsung ditemui Cak Nasih, sapaan ketua DPRD Sidoarjo. Pertemuan kedua pihak berlangsung begitu gayeng selama sekitar satu jam.

Dalam kesempatan itu, Syaiful Baqirok mengurai berbagai permasalahan yang tengah dihadapi tim sepakbola kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Mulai dari permasalahan sewa stadion Delta yang mahal sebagai homebase hingga menyangkut krisis finansial. "Intinya, Deltras saat ini menghadapi krisis keuangan. Nggak duwe duit menghadapi musim tahun ini, padahal targetnya harus lolos ke Liga 1," kata Baqirok.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menghadap ke pimpinan legislatif ini berharap mendapat perhatian, sekaligus dibantu mencari solusi menyelesaikan permasalahan tim sepak bola yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat Sidoarjo.

CAKRAWALA
Nusantara Lebih Dekat

"Kami ingin Deltras tetap di Sidoarjo. Kami menghargai apa yang menjadi keinginan deltamania telah direspon poisitif ketua DPRD," ujarnya."Semoga segera ada solusi sehingga Deltras dalam mengarungi Liga 2 tahun ini mampu berprestasi dan menembus Liga 1 untuk musim depan sesuai harapan kami," tambah Baqirok.

Sementara itu, Cak Nasih memahami keresahan Deltamania, terkait permasalahan yang dihadapi Deltras FC. Apalagi tim sepakbola ini sudah menjadi kebanggaan, bahkan sudah seperti milik masyarakat Sidoarjo. Apalagi menilik perjalanan awal, tim sepak bola ini merupakan milik Pemkab Sidoarjo, sebelum akhirnya beralih menjadi klub profesional yang dikelola manajemen PT Delta Raya Sidoarjo.

(Foto : Amar DPRD Sidoarjo)

"Jadi wajar masyarakat Sidoarjo yang cinta bola ikut resah atas permasalahan Deltras. Kita pun tentunya berkeinginan sama, agar Deltras dapat berprestasi lebih," ujarnya. "Jika musim tahun ini bermain di Liga 2, maka tahun depan harus mampu menembus Liga 1," tambah Cak Nasih.

Soal permasalahan dihadapi Deltras, Cak Nasih mengatakan pihaknya segera membahas bersama eksekutif sebagai upaya mencari solusi yang tepat. Terutama membantu mengatasi krisis finansial Deltras sebagai persiapan memasuki Liga 2 musim 2025/2026.

CAKRAWALA
Nusantara Lebih Dekat

"Kalau dibantu dana dari APBD, itu jelas tidak mungkin, karena aturannya memang dilarang. Namun kami pastikan banyak solusi yang dapat dilakukan," ujarnya. "Dan kami segera membahasnya bersama Pak Bupati, maupun dengan Pak Amir (manajemen Deltras, red) sepulang dia beribadah haji," ujarnya.

Lebih lanjut, pimpinan legislatif juga menjabat Ketua DPC PKB Sidoarjo ini membeberkan berbagai terobosan sebagai langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Deltras. Di antaranya menggandeng perusahaan di wilayah Sidoarjo sebagai sponsorship, dalam hal ini pihaknya bersama eksekutif siap menjadi fasilitator.

Hal ini, lanjut dia, sangat memungkinkan dilakukan, apalagi di Sidoarjo banyak perusahaan besar yang bisa digandeng sebagai sponsorship. "Dan itu urusannya sudah Ji tu Ji antara pihak perusahaan dan manajemen Deltras, sedang kami sifatnya hanya memfasilitasi saja," ujarnya.

Alternatif lain, lanjut dia, untuk menyelesaikan krisis finansial pihak manajemen bisa menjual sahamnya ke publik. Seperti pernah dilakukan Mitra FC yang menjual sahamnya kepada masyarakat Surabaya dalam mengatasi persoalan finansial. "Itu bisa ditiru manajemen Deltras dengan menjual sahamnya ke masyarakat maupun perusahaan di Sidoarjo. Benefitnya lagi akan semakin tumbuh rasa memiliki Deltras," ucapnya.

CAKRAWALA
Nusantara Lebih Dekat

Soal homebase, pihaknya berharap tim sepakbola yang sudah identik, bahkan telah menjadi bagian dari ikon Kota Delta ini tetap berada di Sidoarjo. Begitu pula soal keluhan tingginya tarif sewa Stadion Delta sebagai homebase Deltras, tentunya dapat dibicarakan lagi bersama Pemkab Sidoarjo. "Jadi tidak ada alasan Deltras hengkang dari Sidoarjo. Semua permasalahan pasti ada solusinya," tegas Cak Nasih.

CAKRAWALA
Nusantara Lebih Dekat

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Deltras Nggak Boleh Mati! Jeritan Deltamania Soal Sekarat Finansial Sambat ke DPRD Sidoarjo

Selasa, 27 Mei 2025 | 23:36 WIB

Deltras FC krisis finansial! Deltamania ngadu ke DPRD Sidoarjo, Nasih janji fasilitasi sponsor demi selamatkan ikon sepak bola Kota Delta. Foto: Istimewa

Ads by Ruang.co.id

Ads by Ruang.co.id

Ruang Nurudin

Print PDF

Sidoarjo, Ruang.co.id – Pertemuan Legislator Sidoarjo dengan suporter bola, tetap penuh semangat tinggi, meski yamg ditemuinya, raut muka mereka tampak masam. Itulah gambaran audiensi yang tersaji di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (27/5/2025) sore. Dimana Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menerima rombongan Deltamania, suporter militan Deltras FC, yang berupaya tegar membawa misi mulia!. Menyelamatkan klub kebanggaan Kota Delta dari krisis finansial.

Perwakilan rombongan mereka, dipimpin langsung Ketua Deltamania, Syaiful Baqirok, dan disambut hangat oleh Cak Nasih, sapaan akrab Abdillah Nasih Ketua DPRD. Dalam suasana guyub, kedua pihak berdiskusi penuh rasa memiliki terhadap Deltras FC, tim yang telah menjadi ikon sepakbola masyarakat Sidoarjo.

"Deltras sedang krisis keuangan. Nggak duwe duit untuk musim ini, padahal targetnya lolos ke Liga 1," ungkap Baqirok dengan nada prihatin namun tetap bersemangat. Rasa cinta Deltamania terhadap tim sepak bola kebanggaannya tidak sekadar euforia tribun, tetapi juga panggilan nurani untuk menjaga warisan olahraga Sidoarjo.

Menanggapi hal itu, Abdillah Nasih menunjukkan leadership yang visioner dan inovatif. Ia menegaskan bahwa meski bantuan dana dari APBD tidak memungkinkan secara regulasi, solusi tetap bisa diciptakan. "Kalau pakai APBD tidak mungkin, tapi banyak solusi lain. Kita akan fasilitasi perusahaan-perusahaan di Sidoarjo jadi sponsor Deltras," ujarnya menyemangati.

Nada penuh optimisme, ia juga mengusulkan agar manajemen Deltras mempertimbangkan penjualan saham ke publik, sebagaimana pernah dilakukan klub lain. Ide ini bukan hanya solusi finansial, tetapi juga strategi menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap klub mereka.

Banyak dibaca

1 Dugaan Gelar Akademik Palsu pengacara kondang Robert Simangunsong Jadi Terdakwa Di PN Surabaya

2 Drama Korea "Family Plan" Kisah Keluarga Super yang Menyamar

3 Air Supply dan Rick Price Bakal Konser di Indonesia Bersama MLTR! Cek Line Up dan Harga Tiketnya

4 Gaji UMR Sidoarjo 2025 Resmi Naik, Posisi Ketiga Tertinggi di Jawa Timur

5 Mandi Air Garam, Ritual Alami untuk Kesehatan Tubuh dan Jiwa

Attack Lock

0 spam
diblokir oleh Akismet

Nasih pun menegaskan komitmennya menjaga Deltras tetap berhomebase di Stadion Delta. Tarif sewa yang tinggi akan dibicarakan ulang bersama Pemkab. “Deltras sudah jadi bagian dari Sidoarjo. Tidak ada alasan hengkang. Semua pasti ada solusinya,” tegasnya.

> **Baca Juga** **Open House Wabup Mimik Idayana! Keakraban Pejabat dan Insan Pers di Sidoarjo**

Pertemuan ini tak hanya menjadi momentum mencari solusi, tetapi juga mencerminkan nilai fair play dan humanisme dalam olahraga: bahwa sepakbola bukan semata pertandingan, tapi juga alat pemersatu dan penggerak semangat kolektif masyarakat. Deltamania dan DPRD hari ini mengajarkan bahwa sinergi, empati, dan aksi nyata bisa menciptakan perubahan besar.

Semangat sportivitas ini adalah teladan inspiratif bagi generasi muda, bahwa cinta terhadap klub bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal perjuangan menjaga identitas dan kebanggaan bersama.

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Soroti Minimnya Sarpras Kesehatan, DPRD Sidoarjo Desak Pemkab Segera Bertindak

by redaksiWD 27/05/2025 0 36

SHARE

DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Komisi C mendesak Pemkab Sidoarjo khususnya Dinas Kesehatan setempat untuk segera menambah sarana dan prasarana penunjang yang ada di 31 puskemas yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di Sidoarjo.

SIDOARJO (wartadigital.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyoroti minimnya sarana dan prasarana penunjang yang ada di layanan kesehatan dasar atau puskesmas di Sidoarjo. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Komisi C mendesak Pemkab Sidoarjo khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Sidoarjo untuk segera menambah sarana dan prasarana (sarpras) penunjang yang ada di 31 puskemas yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di Sidoarjo.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Abud Asyrofi menjelaskan ketua dan seluruh anggota Komisi C mendesak Dinas Kesehatan untuk menambah sarpras penunjang di 31 puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Desakan ini karena mayoritas sarpras penunjang di puskesmas masih minim. Sejumlah sarpras penunjang itu, di antaranya penambahan lahan parkir, ruang tunggu, kamar layanan serta mobil operasional.

"Minimnya sarpras di puskesmas kami ketahui saat sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo ini melaksanakan sidak di sejumlah puskesmas yang ada di wilayah perbatasan. Di antaranya Puskesmas Balongbendo, Pukesmas Kedungrejo (Kecamatan Waru), Puskesmas Wonokasian (Kecamatan Wonoayu) serta Puskesmas Tarik 1 dan Puskesmas Tarik 2," jelas M Abud Asyrofi, Selasa (27/5/2025).

Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan dirinya bersama sejumlah anggota komisi lainnya sudah melakukan pengecekan sejumlah puskesmas yang terbesar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

"Kondisi puskesmas yang sudah kami datangi hampir sama, semua rata-rata masih sangat minim sarpras penunjang karena itu Dinas Kesehatan (Dinkes) harus segera menambah sejumlah sarpras penunjang itu, agar hak mendapatkan layanan memadai bisa diberikan untuk warga Sidoarjo yang membutuhkan setiap pelayanan kesehatan di puskemas," ujar M Abud Asyrofi.

Politisi dari Daerah Pilihan (Dapil) IV Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik ini mencontohkan di Pukesmas Balongbendo misalnya, jumlah pasien di Puskesmas Balongbendo terus meningkat seiring dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan di puskemas yang ada di wilayah Sidoarjo Barat (Sibar) itu.

"Sebut saja, pada hari-hari tertentu seperti Hari Senin dan Hari Selasa, jumlah kunjungan bisa menembus lebih dari 200 pasien per hari. Nah itu, menjadi salah satu alasan kami mendesak Dinkes Sidoarjo segera merealisasikan sarpras penunjang itu. Seharusnya saat kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas Balongbendo semakin meningkat, fasilitas penunjangnya juga harus sejalan. Ini harus segera ditindaklanjuti Dinkes. Kalau tidak kasihan masyarakat Sidoarjo," ungkap politisi yang berpengalaman dalam mendampingi anggota DPR RI selama beberapa periode ini.

Anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo yang akrab disapa Abud ini menilai, kondisi puluhan puskesmas itu masih belum diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang yang memadai. Apalagi, lanjut Abud kondisi itu hampir sama dirasakan dan dikeluhkan puluhan pukesmas lainnya kecuali Puskesmas Krian, Wonoayu, Sidoarjo Kota, Porong, Sedati dan Puskesmas Taman.

"Minimnya sarpras penunjang ini sudah dikeluhkan hampir sebagian besar masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di puskesmas terdekat dari rumahnya. Bahkan sudah dikeluhkan para pegawai dan pengelola pukesmas. Tapi sampai sekarang belum mendapatkan perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) sama sekali," tegas politisi muda yang dikenal berasal dari kalangan santri Sidoarjo ini.

Usai dilaksanakan treasing, lanjut Abud salah satu kendala utama yang dikeluhkan masyarakat keterbatasan area parkir yang kerap tidak mampu menampung kendaraan pasien dan kamar perawatan. Bagi Abud, permasalahan sarpras semacam ini banyak terjadi di sejumlah puskesmas lainnya. "Masalah ini, perlu menjadi perhatian serius Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Rata – rata puskesmas memang terkendala di sarpras penunjang. Begitu juga soal tambahan ruang pelayanan dan mobil operasional. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kualitas layanan di masing-masing pukesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo," papar Abud.

Abud merinci lagi, misalnya saat ini Puskesmas Balongbendo melayani warga dari 20 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Balongbendo. Pihaknya menilai, beban layanan yang ditanggung Puskesmas Balongbendo cukup besar. Oleh karena itu, menurutnya perlu ada langkah strategis untuk mendukung peningkatan layanan bagi masyarakat sekitarnya.

wartanusa.com

"Salah satunya dengan penambahan sarpras penunjang itu dan puskesmas pembantu di wilayah sekitar dihidupkan lagi. Karena sebenarnya, bangunan puskesmas pembantu sudah ada. Tinggal dilengkapi fasilitas, sarpras dan Sumber Daya Manusia (SDM) – nya agar bisa segera difungsikan. Pelayanan di puskesmas utama tidak membeludak dan berjubel-jubel," jelasnya.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo lainnya, Prabata Ferdiansyah. Menurut politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) setelah melaksanakan sidak di sejumlah puskemas sekaligus mengetahui kondisi di lapangan, pihaknya mendorong optimalisasi RSUD Krian atau Sidoarjo Barat (Sibar) untuk mengurangi beban layanan di wilayah Sidoarjo Barat. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan untuk warga Kecamatan Krian, Balongbendo, Kecamatan Tarik dan Kecamatan Prambon.

"Kami berharap RSUD Sibar bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan perannya agar layanan kesehatan masyarakat Sidoarjo Barat lebih merata dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat yang terbagi di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo," ucap politisi asal Dapil IV Sidoarjo (meliputi Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik) ini.

Selain itu, Prabata berharap Dinkes Pemkab Sidoarjo bisa segera menginventarisir sejumlah puskemas yang dinilai kekurangan sarpras penunjang itu. Nantinya, saat melaksanakan rapat Badan Anggaran (Banggar) bakal dibahas kebutuhan anggarannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarpras penunjang yang dibutuhkan puluhan pukesmas yang ada di Sidoarjo itu. "Kami juga tidak keberatan kalau semua direncanakan sejak tahun ini, kemudian selanjutnya direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Semua ini demi pelayanan kesehatan maksimal dan memadai yang dibutuhkan masyarakat Sidoarjo," tandas politisi muda asal Kecamatan Tarik ini.

Begitu juga Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan. Menurut politisi senior Partai Gerindra ini, pihaknya sebagai pimpinan DPRD Sidoarjo selalu memberikan support penganggaran untuk memfasilitasi dan merealisasikan kebutuhan sarpras penunjang di puluhan puskesmas di Sidoarjo.

"Tapi, catatannya agar diinventarisir semua kebutuhan anggarannya agar bisa direalisasikan meski pelaksanaanya dilaksanakan secara bertahap. Tapi kalau Dinkes Kabupaten Sidoarjo tidak mau menginventarisir maka dewan hanya bisa memberikan dorongan dan desakan saja," pinta mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo yang sekaligus politisi asal Dapil IV ini.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Dr Fenny Apridawati mengakui jika beberapa puskemas kekurangan sarpras penunjang. Hal itu, juga disebabkan masih minimnya anggaran untuk menambah sarpras penunjang di seluruh pukesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu.

"Kami mengucapkan terima kasih atas masukan para dewan (anggota DPRD Sidoarjo) itu. Kami akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait lainnya termasuk Dinkes Sidoarjo agar masukan itu bisa dipenuhi secara bertahap sekaligus menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada di APBD Kabupaten Sidoarjo," pungkas Fenny yang juga mantan Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo ini. sis

wartanusa.com